



B 4

ISSN: 1978-1938

Jurnal MANAJEMEN PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan

- **Kontribusi Pendidikan bagi Pembangunan Ekonomi Negara**
Oleh: *Nurtanio Agus Purwanto*
- **Konsep *Human Investment* dalam Konteks Pembangunan Masyarakat**
Oleh: *Elin Rosalin*
- **Pemberdayaan Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan**
Oleh: *Sudiyono*
- **Analisis Situasi Dampak Desentralisasi Pendidikan pada Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**
Oleh: *Suharsimi Arikunto*
- **Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Desentralisasi Pendidikan pada Era Otonomi Daerah**
Oleh: *MM Wahyuningrum*
- **Desentralisasi dan Mahalnya Biaya Pendidikan**
Oleh: *Muljani A. Nurhadi*
- **Kepemimpinan Visioner dalam Kancah Global**
Oleh: *Sunarta*
- **Membangun Komunikasi Efektif di Sekolah**
Oleh: *Mada Sutapa*

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan
Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI)

Nomor: 02/Th II/Oktober/2006

Nomor 02/Th.II/Oktober/2006

Pelindung : Muh. Farozin
Penanggungjawab : Tatang M. Amirin
Pemimpin Redaksi : Suyud
Sekretaris Redaksi : Mada Sutapa
Rahmania Utari

Anggota Redaksi:
Moeljani A. Nurhadi
Suharsimi Arikunto
Sudiyono
Setya Raharja

Penyunting Ahli:
Hendyat Sutopo (UM)
Suminto A. Sayuti (UNY)

Tata Letak:
Nurtanio Agus P.

Diterbitkan oleh:
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
bekerjasama dengan
IKATAN SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA (ISMaPI)

Alamat Redaksi:
Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Tlp. 0274-550842, Fax. 0274-540611
e-mail: apfipuny@yahoo.com

Redaksi menerima tulisan berisi kajian pendidikan. Tulisan belum pernah dipublikasikan, diketik spasi ganda, dengan jumlah kurang lebih 15 halaman kwarto. Sistematika dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, penutup, dan diakhiri daftar pustaka. Tulisan dilengkapi dengan biodata penulis secukupnya.

DAFTAR ISI

Kontribusi Pendidikan bagi Pembangunan Ekonomi Negara <i>Oleh: Nurtanio Agus Purwanto</i>	1-7
Konsep <i>Human Investment</i> dalam Konteks Pembangunan Masyarakat <i>Oleh: Elin Rosalin</i>	8-20
Pemberdayaan Masyarakat dalam Otonomi Pendidikan <i>Oleh: Sudiyono</i>	21-30
Analisis Situasi Dampak Desentralisasi Pendidikan pada Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota <i>Oleh: Suharsimi Arikunto</i>	31-40
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Desentralisasi Pendidikan pada Era Otonomi Daerah <i>Oleh: MM Wahyuningrum</i>	41-49
Desentralisasi dan Mahalnya Biaya Pendidikan <i>Oleh: Muljani A. Nurhadi</i>	50-58
Kepemimpinan Visioner dalam Kancah Global <i>Oleh: Sunarta</i>	59-68
Membangun Komunikasi Efektif di Sekolah <i>Oleh: Mada Sutapa</i>	69-76

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM OTONOMI PENDIDIKAN

Sudiyono*)

Abstract

Education Autonomy is a form of decentralization of educational management, including the school principal. That condition requires empowerment of all components of interest to education (stakeholders). Commitment of stakeholders in understanding and applying this paradigm strongly support the success of various sectors, including education sector. In this context, the independence of the managers are required to have the ability to negotiate. The process of negotiation can be done through qualitative theory and metaphore arena.

Key words: *education autonomy, community empowerment*

A. Pendahuluan

Ekspansi dan intervensi kekuasaan pemerintah pusat yang menguasai kinerja seluruh sumber daya sosial, politik, dan ekonomi dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah dan pengelolaan program pembangunan telah mengakibatkan terjadinya over loaded bagi pemerintah. Kondisi ini juga didukung oleh birokrasi pemerintah yang menggurita. Birokrasi yang tidak efisien, bahkan telah terjadi pathologi birokrasi. Daniel Bell sebagaimana dikutip oleh Susila zauhar (1994) menyebutkan pemerintah tak sanggup lagi memikul beban tugas secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada sisi lain ekspansi dan intervensi hegemoni Pemerintah Pusat telah menyebabkan Pemda menjadi mandul, tergantung dan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Pemda dalam mengelola pembangunan di daerah semakin rapuh. Bagi instansi dinas juga sangat sulit untuk melaksanakannya karena memiliki dua pimpinan. Sedangkan bagi instansi vertikal tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan, selain hanya sebagai pelaksana di lapangan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pada pemerintahan yang sentralistik wewenang daerah dan instansi vertikal hanya bersifat dekonsentratif. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi merupakan penyesuaian kebijakan (*policy adjustment*) terhadap tuntutan reformasi yang sudah tidak dapat ditunda, guna mengurangi beban pemerintah pusat sekaligus meningkatkan *capacity building* dan secara faktual pemerintah telah mengeluarkan

* Sudiyono adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY